

PETANI DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI EKONOMI

Akhmad Zaini Abar

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian, Fakultas Pertanian, UGM, Yogyakarta,
sedang mendalami antropologi budaya pada Program Studi Antropologi, Jurusan
Ilmu-ilmu Humaniora, Pasca Sarjana UGM

ABSTRACT

The concepts of rational and moral choices are both of ideal types in social science. These are only use for a social analysis and not for a social engineering. The rational peasants do not indicate the rational choice that have been introduced by Samuel L. Popkin, they are, on the other hand, in moral choice that have been stated by James C. Scott. The commercialization of peasants and agricultural sectors do not reflect the rational peasant's movement. In the essay, the Indonesian case, the commercialization of peasants are an effect of the state's project of colonial era and the New Order, these aren't the articulation of the rational peasants.

PENDUHLUAN

Di kalangan ilmuwan sosial Indonesia dan dunia perguruan tinggi di Indonesia, kajian khusus tentang antropologi pe(r)tani(an) masih sangat kurang, kalau tidak mau dikatakan belum ada yang serius.¹ Bahkan, di Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta,² dan tentu juga di berbagai fakultas pertanian di universitas lain yang ada di Indonesia, belum memiliki seorang pun antropolog atau dosen antropologi yang memiliki minat khusus pada masalah-masalah petani dan pertanian. Padahal, kajian-kajian antropologis tentang masyarakat (Jawa) di Indonesia awal mulanya banyak yang menempatkan petani dan pertanian sebagai subyek utama kajiannya, mulai dari karya "klasik" seperti karya etnografi yang ditulis oleh Clifford Geertz (1963), yakni *Involusi Pertanian*. Lalu karya-karya etnografi modern seperti, Hans Antlov (1995) dalam buku etnografinya berjudul *Exemplary Centre, Administrative Periphery [Rural Leadership and the New Order in Java]* tentang intervensi politik negara ke desa (wilayah dan masyarakat pertanian); dan Robert Hefner (1999),

¹ Sebagai bahan perbandingan perlu dikemukakan di sini bahwa berbagai kajian antropologi di tingkat global pun juga sering mengabaikan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi petani (*peasant*). Mereka seringkali dicitrakan sebagai sisa-sisa masyarakat pra-industri Eropa dan masyarakat pedesaan pada masa kolonial. Petani menjadi kelompok sosial marginal dalam studi antropologi dunia. Lihat Michael Kearny, *Reconceptualizing the Peasantry, Anthropology in Global Perspective*, 1996, Westview Press Inc. A Division of Harper Collin Publishers, USA, p.1.

² Sementara itu, studi sosiologi pertanian (sebelumnya sosiologi pedesaan, meskipun kedua hal ini punya banyak perbedaan) sudah cukup lama masuk dalam kurikulum Fakultas Pertanian UGM, dan diperdalam dengan mata kuliah lainnya, seperti Perubahan Sosial, Sosiologi Keluarga dan Pembangunan Masyarakat Desa serta Komunikasi Sosial di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Lihat silabus baru Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, 2001/2002, sedangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB), sudah cukup lama dibuka program S-2 untuk Sosiologi Pedesaan.

Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik [di kalangan petani pegunungan]; serta bahkan studi antropologi post-modern, seperti etnografi karya Anna Lowenhaupt Tsing (1998), *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan* [studi tentang petani ladang dalam kasus komunitas Dayak Meratus, di Kalimantan Selatan].

Kurangnya atau kelangkaannya studi antropologi di bidang pertanian ini (barangkali) secara langsung ataupun tidak langsung, yang melahirkan masalah-masalah (kebijakan) pembangunan pertanian di Indonesia, baik yang dipikirkan oleh para pakar ekonomi dan politik pertanian maupun para pengambil kebijakan pembangunan pertanian, cenderung menempatkan persoalan pembangunan pertanian hanya sebagai masalah-masalah teknik pertanian semata-mata. Dalam arti, masalah pembangunan pertanian adalah urusan teknis pembibitan, pemupukan, penggunaan pestisida, pembangunan irigasi, panen hasil pertanian, teknologi pasca panen, harga, pasar, dan lain-lain. Meskipun cukup banyak studi sekitar aspek sosial (sosiologi) dan ekonomi dalam masalah-masalah petani dan pertanian, tetapi seringkali bersifat positivistik, dengan *metode survei* sebagai pilihan metode riset yang didominasi dipergunakan, yang menghasilkan angka-angka agregat dan statistik kecenderungan.³ Hal yang terakhir ini seringkali mengabaikan sosok (manusia) petani serta kebudayaannya sebagai faktor penting dari (masalah) pembangunan pertanian di Indonesia. Padahal kedua hal ini (manusia petani dan kebudayaannya) tidak lagi hanya menjadi konsumen kebijakan pembangunan yang direkayasa dan direncanakan dari atas, tetapi juga yang menjadi subyek yang memiliki karakter/potensi inisiatif, daya cipta, bahkan intelektualisme lokal yang bisa bersifat anti perubahan, pro-perubahan atau fatalis pembangunan.

Berdasarkan argumen inilah, kajian-kajian antropologis tentang petani dan pertanian di Indonesia cukup signifikan atau bahkan mendesak dilakukan, tidak saja sebagai upaya perluasan wilayah dan intensitas studi antropologi di Indonesia, tetapi juga untuk lebih memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan kebudayaan dalam studi (pembangunan) pertanian di Indonesia yang selama ini diabaikan. Selain itu, kajian-kajian antropologis ini dapat memberikan sejumlah rekomendasi yang bersifat praktis bagi persoalan-persoalan petani dan pertanian di Indonesia yang hingga kini seperti sedang berjalan di tempat atau *involusi* meminjam istilahnya Geertz. Kajian-kajian antropologi ini dapat membantu melahirkan program-program "rekayasa sosial" di sektor pertanian yang lebih partisipatif yang melibatkan petani secara lebih jauh dan intens.

³ Sebagai contoh, studi positivistik aspek sosial ekonomi petani dapat dibaca Herman Soewardi, "Respon Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi di Bidang Produksi Pertanian di Jawa Barat," dalam Sajogyo (ed.), *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, 1982, Yayasan Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor; atau Agus Pakpahan dkk. "Perkembangan Kesejahteraan Petani Pangan", *Prisma*, 5/1993 hal. 49-55. Dua studi sangat canggih dalam menyajikan kecenderungan kuantitatif problematik makro petani, tetapi sulit bagi kita mendapatkan informasi bagaimana riil kehidupan masing-masing (keluarga) petani sehari-hari dalam menghadapi dan merespon teknologi baru secara berbeda-beda atau bagaimana tingkat kesejahteraan serta perilaku keluarga petani di masa harga-harga kebutuhan pokok hidup dalam keadaan normal atau sebaliknya harga-harga melonjak tinggi. Sementara itu, studi antropologi pertanian dan petani akan dapat memberikan realitas yang lebih nyata dari kehidupan sehari-hari tentang bagaimana keluarga petani masing-masing merespon masalah-masalah yang mereka hadapi dengan berbagai improvisasi dan adaptasi dalam konteks struktur yang lebih besar. Salah satu contoh prototif studi antropologi yang dilakukan ilmuwan Indonesia yang menarik tentang masalah-masalah yang dihadapi petani misalnya lihat Yunita T. Winarto, "Pengendalian Hama Terpadu: Pembentukan dan Pengalihan Pengetahuan di antara para Petani Padi di Subang, Jawa Barat," dalam buku E.K.M. Masinambow (ed.), *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*, Yayasan Obor dan Asosiasi Antropologi Indonesia, 1997, Jakarta.

Lebih jauh lagi, dalam konteks arah perkembangan pemikiran dan konsep pembangunan pertanian masa depan yang kini dibicarakan dan dicita-citakan banyak ahli, yakni pembangunan pertanian berkelanjutan (*sustainable agricultural development*) yang lebih berusaha untuk menurunkan eksternal *input* sampai tahap sekecil mungkin (*low-external input*)⁴ dan memberdayakan *input* lokal serta menggunakan kearifan dan nilai lokal, di sini studi-studi antropologi pe(r)tani(an) menjadi sangat relevan, penting dan mendesak. Dengan kata lain, studi-studi antropologi pe(r)tani(an) dapat bertemu dan bersama-sama dengan studi-studi dari disiplin lainnya dalam mengembangkan pembangunan pertanian berkelanjutan (*sustainable agricultural development*). Antropologi di sini tidak hanya akan memberikan kontribusinya pada perspektif, teori dan konsep-konsepnya, tetapi juga sejumlah alternatif metodologi dan data lapangan yang kuat.

Tulisan ini dibuat secara sengaja untuk memulai upaya orang Indonesia untuk memahami persoalan petani dan pertanian di Indonesia dari perspektif antropologis ekonomis,⁵ meskipun hanya didasarkan atas kajian pustaka yang dibuat oleh para antropolog atau sosiolog dari luar negeri. Demikian juga, kajian ini hanya bermaksud melihat satu aspek yang selama ini menjadi "perdebatan" para ahli antropologi dan sosiologi tentang problematik ekonomi petani yang pernah ramai di tahun 70-an sampai tahun 80-an. Oleh karena itu, implikasi tulisan ini hanya terbatas pada sejumlah rekomendasi konseptual dan himbauan intelektual kepada kalangan akademik yang berminat mendalami masalah-masalah kehidupan sosial ekonomi petani serta kalangan pengambil keputusan yang punya *political will* yang tinggi untuk selalu melakukan koreksi, introspeksi dan prospeksi kebijakan pembangunan pertanian.

MASALAH EKONOMI MORAL DAN EKONOMI RASIONAL

Petani di Indonesia lebih dekat dalam pengertian *peasant* seperti yang didefinisikan oleh Eric R. Wolf (1983),⁶ yakni orang desa yang bercocok tanam dan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan menunaikan surplus sosial dan ritualnya. Petani dalam pengertian ini berbeda dengan para pengusaha pertanian (*farmer*) yang melakukan kegiatan pertanian sebagai sebuah kegiatan ekonomi bisnis (kapitalis) yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya (Mosher, 1966). Atau mengutip James C. Scott (1983), petani adalah kelompok masyarakat yang hidup secara subsistem dalam rangka bercocok

⁴ Tentang konsep-konsep pertanian masa depan dan *sustainable agriculture* lihat Coen Reijntjes, Bertus Haverkort dan Ann Water-Bayer, *Pertanian Masa Depan, Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah*, 1999, Penerbit Kanisius, Mitra Tani dan ILEIA.

⁵ Kajian antropologi ekonomi meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari pertukaran dan bentuk-bentuk ekonomi yang primitif, pertukaran sosial di pedesaan, hingga masalah pertukaran dan transformasi pasar dalam kehidupan masyarakat modern di perkotaan. Kajian antropologi ekonomi juga melihat bagaimana kehidupan ekonomi pedesaan yang subsisten serta respon ekonomi subsisten ini terhadap desakan perubahan yang datang dari dalam maupun dari luar. Termasuk dalam hal ini orientasi dan perilaku masyarakat pedesaan, terutama petani (*peasant*), dalam menghadapi berbagai tekanan perubahan yang lebih luas. Lihat Sjafriz Sairin dkk., *Antropologi Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002. Tulisan ini hanya membatasi diri pada bentuk-bentuk kesadaran dan orientasi (ekonomi) petani dalam menghadapi desakan perubahan di kalangan petani.

⁶ Salah satu pendefinisian petani (*peasant*) dan studi kasus yang cukup komprehensif tentang ekonomi petani yang memasukkan dimensi fisik, kultur, ekonomi dan sosial, misalnya dapat dilihat dari Teodor Shanin, (ed.), *Peasants and Peasant Societies*, new edition, Penguin Books, England, 1987; dan Rhoda Halperin and James Dow (ed.), *Peasant Livelihood, Studies in Economic Anthropology and Cultural*, ST. Martin's Press, 1977, New York, p. 1-16.

tanam dan beternak. Meskipun petani punya surplus (hasil yang tidak dikonsumsi habis untuk kebutuhan keluarga, untuk surplus sosial dan ritual) dan kemudian dijual ke pasar, tetapi hasilnya tetap dalam konteks untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka yang lainnya [minyak tanah, garam, lauk-pauk, dll] agar terjaga terus dan aman sepanjang masa. Argumen Scott ini perlu digaris-bawahi karena seringkali karena dikacaukan dengan istilah komersialisasi petani dan sektor pertanian yang dikatakan sudah melanda negeri ini, khususnya di Jawa (Collier, dkk., 1996). Oleh karena itu, komersialisasi petani dan pertanian tidak dengan sendirinya mengubah sosok petani *peasant* menjadi petani dalam arti *farmer*. Bahkan yang terjadi sebaliknya, komersialisasi petani dan sektor pertanian untuk kasus Indonesia, -- seperti yang akan dikemukakan lebih dalam setelah bagian ini—justru semakin menjerumuskan petani ke dalam kemiskinan yang semakin parah (Penny, 1982).⁷

Gambaran tentang kehidupan petani sehari-hari selalu menghadapi dilema seperti yang digambarkan oleh Wolf (1993) berikut ini :

“... masalah abadi yang dihadapi kaum tani adalah masalah mencari keseimbangan antara tuntutan-tuntutan dari luar dan kebutuhan petani untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi, dalam usaha mengatasi masalah yang paling mendasar itu, petani dapat menempuh dua strategi yang sama sekali bertentangan satu sama lain. Yakni pertama adalah memperbesar produksi, dan yang kedua adalah mengurangi konsumsi”.
(hal.23)

Menurut Wolf, strategi yang *pertama* adalah dilakukan petani dengan meningkatkan hasil kerja di atas tanahnya untuk menaikkan produksi dan memperbesar jumlah hasil bumi yang akan dijual ke pasar. Hal ini berarti petani harus mengerahkan faktor-faktor produksi yang diperlukan, seperti tanah, tenaga kerja, modal, *input* (bibit, pupuk, pestisida, dll.) serta pemahaman tentang pasar. Dengan kata lain, memilih strategi pertama berarti petani menentukan keputusan-keputusan berdasarkan pilihan-pilihan rasional (*rational choice*). Sementara itu, apabila petani memilih strategi *kedua*, yakni dengan cara mengurangi konsumsi mereka, maka berarti petani membatasi masukan kalorinya (untuk kebutuhan biologis keluarganya) pada jenis-jenis barang makanan yang paling pokok saja, sehingga ia mampu menekan belanja di pasar sampai pada beberapa jenis barang esensial saja. Sebagai gantinya, petani mengerahkan anggota-anggota keluarganya sendiri untuk menghasilkan bahan makanan yang diperlukan di lingkungan rumah dan sawah/ladang sendiri. Pada saat yang sama petani-petani mendukung usaha mempertahankan hubungan-hubungan sosial tradisional dan pengeluaran dana-dana serimonial yang diperlukan untuk menopang hubungan-hubungan tersebut. Strategi ini sama dengan konstruksi Geertz (1983:102) tentang kemiskinan bersama (*shared*

⁷ Perlu disebutkan di sini pandangan post-modernis, yakni dari Michael Kearney yang mengkritik pandangan-pandangan dikotomis dan dualisme konseptual tentang petani (*peasant*) yang selama ini ada di kalangan *developmentalist* (liberal-kapitalis), marxis, maupun romantis tentang petani. Kearney menawarkan konsep postpeasant, yakni melihat entitas petani sebagai suatu etnis dan mentransformasikan diri dalam bentuk komunitas transnasional (TNCs, *Transnational Communities*), suatu jaringan sosial dan komunikasi yang luas, yang didasarkan pada aspek kultur dan politik (tidak hanya basis mata pencaharian dan kontrol atas tanah semata) yang sama dalam menghadapi pihak dan kekuatan luar dengan isu *human rights* dan *ecopolitics*. Lihat Kearney, 1996, op.cit., p.171-186.

AGROEKONOMI

poverty) tentang budaya petani Jawa.⁸ Barangkali strategi yang terakhir ini dapat disebut sebagai pilihan moral (*moral choice*).

Dalam konteks dua strategi petani inilah sesungguhnya tulisan ini hendak menempatkan bagaimana "perdebatan"⁹ antara konsep *ekonomi moral* yang dikonstruksi oleh James C. Scott (1976, 1983) dan ekonomi rasional yang dikonstruksi oleh Samuel L. Popkin (1979, 1986) di kalangan petani. "Perdebatan" petani moral dan petani rasional tersebut lebih merupakan diskusi dan kajian yang lebih detail dan mendalam terhadap dua macam strategi petani (peasant) yang dikonstruksi oleh Eric Wolf dua dasawarsa sebelumnya.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari skema yang disusun secara dikotomis berikut ini:

	Ekonomi Moral	Ekonomi Rasional
Asumsi Dasar	Petani selalu berada dalam kondisi yang rawan krisis subsistensi, antara batas-batas kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dengan kekurangan pangan, kelaparan, bahkan kematian. Pengalaman yang lama dalam menghadapi kondisi rawan krisis inilah yang melahirkan etika subsistensi.	Petani adalah individu-individu yang punya kemampuan otonom untuk mengambil keputusan secara rasional atas berbagai alternatif pilihan dalam berusaha.
Prinsip Hidup	Petani selalu berusaha untuk mendahulukan selamat daripada pilihan mendapatkan untung yang banyak dengan tingkat resiko krisis subsistensi yang tinggi. Prinsip hidup petani adalah <i>dahulukan selamat, safety first</i> .	Petani adalah makhluk yang berusaha bertindak dalam pilihan-pilihan yang rasional untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan hidup, alternatif berusaha atau berproduksi, dan dalam hal ini mengejar dan mengutamakan profit.
Organisasi sosial	Desa-desanya sebagai fungsi-fungsi sosial kolektif dari etika subsistensi, di mana desa sebagai tempat berbagi rasa aman, bertukar surplus sosial atau berbagi kekurangan agar keadaan kelangsungan hidup terus terjaga.	Desa-desanya sebagai suatu kompleksitas ekonomi (wilayah investasi, produksi, konsumsi, dan pertukaran barang), tempat setiap individu petani dapat mengejar tujuan-tujuan hidup rasionalnya.

⁸ Konsep Geertz tentang *shared poverty* dan *agricultural involution* memang banyak mendapat kritik dan penilaian, misalnya oleh William L. Collier, "Agricultural Evolution in Java, The Decline of Shared Poverty and Involution", *stenselan*. Bogor, 1977; Benjamin White, "Agricultural Involution, a Critical Note", 1974, Bogor, *Agro-economic Survey, Workshop Rural Dynamics Study*; Gordon P. Temple, "Mundurinya Revolusi Pertanian: Migrasi Kerja dan Pembangunan Pendapatan di Pedesaan Jawa," *Prisma*, No.3/1976; Mubyarto, "Involusi Pertanian dan Pemberantasan Kemiskinan, Kritik Terhadap Clifford Geertz", *Prisma*, No.2/1978; dan Hirooyoshi Kano, "Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan Jawa: Suatu Penafsiran Kembali", dalam Akira Nagazumi, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, Yayasan Obor Indonesia, 1986, Jakarta.

⁹ Antara James C. Scott dengan Samuel L. Popkin memang tidak terjadi perdebatan atau polemik tentang petani dalam tulisan-tulisan mereka. Oleh karena, sampai sekarang (dari penelusuran berbagai literatur yang ada, misalnya lihat catatan judul buku dan artikel karya Scott dalam bukunya, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Yayasan Obor Indonesia, 2000, Jakarta) Scott tidak pernah melayani dan menjawab kritik dan kecamaran yang diajukan oleh Popkin kepadanya. Apalagi komentar dan tulisan Popkin lebih cenderung mewakili ketakutan ideologi kaum kapitalis (Amerika Serikat) terhadap berbagai gerakan kesadaran dan otonomi petani terhadap pasar. Lebih dari itu Popkin terlihat lebih emosional. Misalnya, baca wawancara dengan Samuel L. Popkin, "Memahami Petani secara Rasional" dalam dialog *Prisma*, No. 9/1989.

¹⁰ Popkin mengatakan bahwa Eric Wolf ialah sebagai salah seorang penganut atau penganjur pendekatan ekonomi moral (petani), terutama setelah terbit buku karya Eric Wolf yang berjudul: *Peasant War of The Twentieth Century*, Harper and Row, 1969, New York. Lihat Samuel L. Popkin, *Petani Rasional*, terjemahan Sjahrir Mawi, Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri, 1986, Jakarta.

AGROEKONOMI

Hubungan Patron-Klien	Hubungan patron-klien dilihat sebagai salah satu mekanisme etika subsistensi, di mana patron selalu menjamin keamanan dan kelangsungan subsistensi para kliennya dan sebaliknya kliennya selalu setia memberikan surplus-surplusnya secara berkala kepada para patronnya.	Para patron dianggap sebagai pembonceng-pembonceng (<i>free riders</i>) desa yang tidak memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam penyediaan barang-barang, tetapi mereka mendapat keuntungan.
Penyebab Krisis	Krisis-krisis subsistensi yang dialami petani, selain karena deraan alam (hujan lebat dan panjang, banjir, badai, kemarau panjang atau serangan hama penyakit), adalah kolonialisme, intervensi pasar yang dalam, serta kebijakan negara yang berpihak pada orang kota atau pertumbuhan ekonomi.	Monopoli negara, sikap anti pasar, anti inovasi teknologi, mental konservatif petani akan modernisasi dan perubahan.
Teknologi Pertanian	Petani bersikap konservatif terhadap teknologi baru, terutama yang punya resiko tinggi bagi kondisi subsistensi. Kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara lama, pengetahuan-pengetahuan warisan dari nenek moyang (<i>local knowledge</i>) lebih diutamakan sebagai pilihan teknologi dalam memproduksi pertanian.	Petani bersikap rasional dalam mengambil keputusan untuk menggunakan teknologi baru dalam produksi pertanian. Apabila suatu teknologi baru dianggap sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, maka ia akan diadopsi. Dan sebaliknya, akan ditinggalkan apabila teknologi tersebut tidak lagi menjanjikan peningkatan dan pertumbuhan produksi.
Perubahan	Suatu tawaran perubahan untuk suatu kemajuan hanya akan diterima apabila ada jaminan kuat akan terhindar dari krisis subsistensi. Proses adopsi atas inovasi di bidang pertanian (teknologi dan organisasi) lebih didasarkan atas pertimbangan resiko kegagalan dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang akan diperoleh, meskipun tinggi.	Perubahan diperlukan sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan rasional petani untuk mencapai suatu kemajuan dan peningkatan kemakmuran hidup. Proses adopsi inovasi (teknologi) baru lebih didasarkan atas pertimbangan tentang keuntungan-keuntungan yang akan dicapai daripada resiko keamanan yang akan diterima.

Bagi Eric Wolf (1983), dua strategi yang disebut di atas, baik *moral choice* (mengurangi konsumsi) maupun *rational choice* (memperbesar produksi) bagi petani bukan suatu pilihan yang bersifat hitam putih, pilihan yang satu dengan meniadakan pilihan yang lain. Keputusan petani untuk memilih suatu strategi amat tergantung pada tatanan sosial yang lebih besar di mana petani mencari nafkah. Oleh karena itu, dengan semakin kuatnya atau sebaliknya, melemahnya suatu tatanan sosial, petani-petani akan menyukai salah satu di antara kedua strategi itu, dan kadang-kadang menggunakan kedua-keduanya dalam waktu bersamaan, tetapi dalam konteks yang berlainan. Periode di mana strategi *rational choice* sangat diutamakan, mungkin disusul oleh periode-periode lain di mana petani melakukan penghematan dan memperbaharui jaringan sosialnya di dalam ruang lingkup yang lebih sempit, dan sebaliknya. Menurut Wolf (1983: 27), petani dalam hal ini selalu berada dalam keadaan dinamis, bergerak selalu secara terus-menerus antara dua kutub pilihan dalam mencari pemecahan atas dilemma mereka yang pokok tersebut.

Berdasarkan uraian di atas jelas sekali bahwa petani adalah sosok yang rasional yang selalu berusaha menentukan pilihan-pilihan hidup yang terbaik di antara berbagai strategi hidup sehingga mereka dapat terus bertahan hidup dan juga untuk berkembang maju. Dalam konteks inilah menjadi tidak relevan lagi dan nampak bernada etnosentrisme argumen Popkin (1986) mengenai definisi konsep ekonomi moral petani sebagai strategi yang tidak rasional, misalnya dalam hal konsep dahulukan selamat (*safety first*). Oleh karena strategi ini dipilih oleh petani sebagai respon yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal (dalam konteks kearifan lokal, *local knowledge*) terhadap suatu keadaan dan dalam kondisi tatanan sosial tertentu. Argumen Popkin tentang petani rasional selalu dihubungkan dengan memilih strategi orientasi komersial dan pasar. Padahal petani yang menolak pasar dan komersialisasi juga merupakan pilihan-pilihan rasional, seperti yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

KOMERSIALISASI YANG NISCAYA DAN HISTORIS

Bagaimanapun kuatnya gerakan-gerakan penolakan kaum tani terhadap proses komersialisasi di sektor pertanian di negeri ini, tetapi dalam sejarah petani ia justru merupakan sebuah keniscayaan. Di negara-negara Afrika, Amerika Latin serta Asia, termasuk Indonesia, komersialisasi pertanian lebih merupakan perpanjangan atau konsekuensi dari kolonialisme Eropa daripada proses sosiologis, ekonomi dan politik internal.¹¹ Hal inilah yang menyebabkan banyaknya penolakan kaum petani terhadap proses komersialisasi yang mereka anggap sebagai salah satu kondisi baru, yang tidak hanya asing bagi mereka, tetapi juga menyakitkan. Oleh karena, komersialisasi atas desakan dari luar ini tidak hanya mengubah relasi-relasi sosial dalam proses produksi pertanian, tetapi juga semakin meningkatkan resiko terganggunya keamanan pangan dan kehidupan mereka.

Kolonialisasi : Komersialisasi yang represif

Proses komersialisasi pertanian di Indonesia dimulai sejak kedatangan kolonialis Belanda dengan VOC-nya. Ketika itu, kongsi dagang ini melihat bahwa "Indonesia" adalah kawasan subur yang merupakan "tambang emas" bagi pencarian atau memproduksi komoditi pertanian ekspor mereka. Seperti dikatakan oleh Clifford Geertz (1983:48-49), yang dilakukan oleh kolonialis Belanda dari tahun 1619 sampai dengan tahun 1942 mencari produk pertanian Indonesia, khususnya di Jawa, yang dapat dijual di pasar dunia tanpa mengubah struktur ekonomi pribumi secara asasi. Kolonialis Belanda tidak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor barang pabrik, dan tidak sedikit pun dapat dibandingkan dengan ekonomi kolonialis Inggris. Oleh karena itu, kepentingan kolonialis Belanda di Indonesia tetap hampir sepenuhnya bersifat *perniagaan* (kapitalisme merkantilis, *penulis*) sampai kekuasaannya berakhir. Perekonomian kolonialis Belanda di Indonesia ini disebut Geertz sebagai perekonomian "menumpang".

Cara-cara kolonialis Belanda untuk menjalankan usaha perekonomian demikian, menurut Geertz adalah dengan menjaga agar penduduk pribumi tetap dalam kondisi semula dan juga agar kaum pribumi tetap menghasilkan produk

¹¹ Di Eropa proses komersialisasi petani berlangsung secara internal, seiring dengan tumbuhnya industrialisasi (kapitalisme industri) awal yang melahirkan petani-petani yang kuat dan maju, baik secara modal, teknologi maupun manajemen produksi dan pemasarannya. Petani-petani inilah yang sekarang dikenal dalam bahasa Inggris disebut sebagai *farmer*.

pertanian untuk pasaran dunia, yakni dengan membentuk struktur ekonomi yang kadang-kadang disebut dualistik yang kronis, bahkan secara intrinsik merupakan struktur yang tidak seimbang. Dalam sektor ekspor, terdapat kapitalisme administratif, yakni satu sistem yang pemegang modalnya, --orang-orang Belanda--, mengatur harga penjualan dan upah, mengontrol pengeluaran, dan bahkan mendikte proses produksi. Kemudian, dalam sektor domestik terdapat usaha pertanian unit keluarga, industri rumah tangga kecil-kecilan dan sedikit perdagangan kecil-kecilan. Pada waktu sektor ekspor berkembang dan meluas, karena didorong oleh meningkatnya harga-harga barang perdagangan dunia, sektor domestik malah justru merosot, yaitu tanah dan tenaga kerja (keluarga tani) tidak lagi dipergunakan untuk usaha subsisten, tetapi untuk mengusahakan tebu, nila, kopi, tembakau, serta berbagai komoditas perdagangan dunia lainnya. Sementara itu ketika sektor ekspor mengecil, sebagai reaksi atas runtuhnya pasar internasional, maka sektor domestik meluas dan penduduk petani yang terus-menerus bertambah berusaha mencari ganti uang mereka yang hilang dan mereka sudah semakin terbiasa dengan jalan mengintensifkan produksi tanaman subsistensi (bahan makanan).

Pada periode tahun 1830 sampai tahun 1870 di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda diterapkan sistem tanam paksa (*Cultuur Stelsel*). Sistem tanam paksa ini dilihat Geertz (1983: 54) sebagai suatu siasat fiskal Van den Bosch dengan cara petani dibebaskan dari pajak¹² atas tanah dan sebagai gantinya mereka harus menanam tanaman ekspor milik pemerintah pada 1/5 luas tanah mereka (yang di dalam praktiknya sering lebih luas, bahkan hampir seluruh luas tanah milik petani) atau sebagai alternatif, petani diharuskan bekerja selama 66 hari dalam setahun di perkebunan-perkebunan milik pemerintah atau dalam proyek lain. Tidak seperti sebelumnya, yang memilih sistem liberalisme ekonomi, yaitu kebijakan kolonial Belanda membebaskan lahan dan petani dari ikatan komunal serta mengizinkan para pengusaha Eropa untuk mendirikan perusahaan-perusahaan atau menanamkan modalnya, pada sistem tanam paksa ini negara kolonial Belanda mengerahkan kekuatan paksanya untuk mengeksploitasi petani agar menanam komoditas yang laku di pasar dunia dan meninggalkan dunia subsistensinya (Husken dan White: 1989:18).

Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Tanah Agraria pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda, proses komersialisasi petani dan pertanian subsistensi semakin menjadi-jadi di Jawa. Sejak itu, kata Geertz (1983:88), jutaan petani pemilik sawah kecil-kecil menyewakan tanahnya kepada perusahaan-perusahaan asing untuk dijadikan lahan perkebunan besar berdasarkan kontrak jangka panjang. Periode inilah di Indonesia dimulai periode pertanian perkebunan besar (kapitalisme perkebunan, *penulis*). Dengan undang-undang ini pula tanah bera yang tidak digarap adalah menjadi milik negara yang pemilikannya tidak dapat dipindah-pindah. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dapat menyewa tanah tersebut atas dasar kontrak jangka panjang yang teratur dengan pemerintah kolonial dan menggunakan hak pakai itu untuk mencari kredit.

¹² Kewajiban membayar pajak tanah kepada pemerintah kolonial di kalangan petani adalah instrumen yang lain lagi yang memaksa petani memasuki proses pertanian. Hal ini disebabkan karena mereka harus mempunyai produk pertanian yang bisa dijual ke pasar untuk mendapat uang guna membayar pajak atau memproduksi komoditas yang dapat dipakai sebagai pengganti uang membayar pajak. Kenyataan ini dapat dibandingkan dalam kasus sejumlah masyarakat petani di Afrika ketika kolonialis Inggris menetapkan pajak di kalangan masyarakat pribumi (petani) Afrika. Lihat George Dalton (ed.), *Tribal and Peasant Economies, Reading in Economic Anthropology*, University of Texas, 1981, USA, khususnya Bab tentang Afrika, hal. 51-168.

Sepanjang pemerintah kolonialis Belanda yang secara *de facto* berakhir pada tahun 1942 ketika bala tentara Jepang masuk ke Indonesia, terjadi proses komersialisasi ekstensif dan intensif di sektor pertanian. Pada masa akhir kekuasaannya, memang pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan politik etis untuk bidang pertanian (pangan) dengan dibangunnya sejumlah irigasi, fasilitas jalan-jembatan, penyuluhan pertanian serta semakin memperkuat komunalitas desa dalam pemilikan tanah. Namun demikian, politik etis ini dicurigai punya *hidden agenda* (kepentingan tersembunyi) yakni untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan kolonial yang diduga boros akibat banyak muncul keresahan sosial, serta selain itu untuk terus mempertahankan produksi tanaman ekspor yang terus membutuhkan tenaga kerja petani yang loyal (Hayami dan Kikuchi, 1987:190-191).

Frans Husken dan Benjamin White (1989:19) mencatat bahwa proses kolonialisasi yang melahirkan komersialisasi pertanian di Indonesia tersebut kemudian melahirkan diferensiasi ataupun perbedaan kelas sosial di kalangan masyarakat pribumi berdasarkan pola pemilikan tanah. *Pertama*, terdapatnya kelompok besar petani *tuna kisma* (tidak punya tanah) yang kadangkala berlindung pada keluarga-keluarga petani yang punya lahan, namun juga sering merupakan kelompok tenaga kerja musiman yang tidak terikat dan cukup tinggi mobilitasnya. *Kedua*, terdapatnya kelompok mayoritas petani (*sikep*, *kuli*, dan sebagainya) yang memiliki hak atas tanah dan untuk hak tersebut mereka berkewajiban membayar pajak dan upeti yang besar jumlahnya. *Ketiga*, adanya pamong desa yang selain menguasai lahan pribadi, juga berhak menguasai sejumlah besar lahan desa sebagai upah mereka mengatur pemerintahan (*lungguh/tanah bengkok*) serta ditambah lagi hak mempekerjakan *sikep* atau *kuli* untuk menggarap lahan tersebut tanpa upah. Dalam konteks inilah, kata Husken dan White, ketika itu sudah lazim adanya hubungan buruh-majikan dan hubungan bagi hasil panen antara petani pemilik dan petani penggarap lahan.

Pada periode tahun 1930-an, proses komersialisasi dan produksi komoditas ekspor menurun drastis akibat depresi dunia yang ditandai dengan menurunnya secara drastis tenaga kerja dan produk perdagangan, sementara sistem *barter* dan *shared poverty* (istilahnya Geertz) semakin menampakkan dirinya di pedesaan. Inilah yang disebut Husken dan White (1989:24) sebagai *demonetisasi* dan *dekomersialisasi* pertanian yang dampaknya sangat dirasakan oleh para petani (petani kaya atau pun buruh taninya) yang ekonominya terkait langsung dengan pasar internasional.

Krisis demonetisasi atau dekomersialisasi ini kemudian terulang kembali ketika ambruknya industri hasil pertanian ekspor dan menurunnya nilai mata uang di masa pendudukan Jepang dan periode perang kemerdekaan (1942-1949). Di masa awal kemerdekaan (tahun 1950 sampai masa Demokrasi Terpimpin) perkembangan komersialisasi di pedesaan sempat pulih, meskipun dalam perekonomian nasional serba menekan. Di masa Demokrasi Terpimpin telah terjadi penurunan ekspor produk pertanian dan non-pertanian, terjadi hiper-inflasi serta kerusuhan politik yang sempat mengganggu pemulihan kembali proses komersialisasi sektor pertanian (Husken dan White, 1989:24-25). Meskipun demikian di masa ini mulai diperkenalkan teknologi baru, yakni pupuk, dalam sektor pertanian pangan yang merupakan wajah lain dari proses komersialisasi petani dan pertanian Indonesia ketika itu.

Revolusi Hijau : Komersialisasi oleh Negara

Periode pemerintahan Orde Baru yang mulai berkuasa tahun 1966 adalah periode berlangsungnya kembali komersialisasi (atau dalam jargon Orde Baru dengan kata: *pembangunan*) di bidang pertanian, meskipun lebih banyak ditujukan untuk peningkatan produksi pangan, bukan produksi komoditas pertanian ekspor seperti di masa kolonial Belanda. Pembangunan pertanian dengan menggunakan teknologi baru di bidang pertanian, yakni penggunaan varietas bibit unggul, pupuk kimia, penggunaan pestisida untuk memberantas hama tanaman serta perbaikan sistem pengairan ini ditujukan untuk peningkatan ketersediaan pangan nasional dalam rangka mendukung stabilitas politik nasional. Penggunaan teknologi baru di bidang pertanian inilah yang dinamakan sebagai revolusi hijau (*green revolution*).

Gordon P. Temple (1976:24) mengatakan bahwa teknologi baru di bidang pertanian di masa Orde Baru ini, khususnya teknologi penggunaan pupuk kimia (bahkan sudah berlangsung mulai tahun 1960) menyebabkan munculnya kembali orientasi komersial di kalangan petani. *Pertama*, pupuk kimia harus dibeli dan tidak dikumpulkan dari kotoran hewan lagi. Tuan-tuan tanah atau petani pemilik hanya dapat menentukan jumlah tepat pupuk yang dipakai, dengan membandingkannya biaya pemakaian lebih banyak pupuk dengan penghasilan lebih yang berhubungan dengan berkembangnya *input*. Petani-petani yang berhasil, belajar memperbesar selisih antara biaya pupuk dan seluruh penghasilan, dengan memakai banyaknya pupuk yang menyebabkan marjin-biaya dan marjin-penghasilan menjadi sama. Mereka kemudian mulai paham dengan menerapkan prinsip yang sama dalam menyewa tenaga kerja.

Kedua, hubungan pemakaian pupuk-kimia dan pengambilan keputusan komersial, tidak didasarkan pada hubungan-hubungan harga, tetapi pada tambahan besar dalam out-put. Pertambahan ini menghasilkan suatu surplus besar untuk tuan tanah atau petani pemilik. Oleh karena rendahnya keuntungan menyimpan emas, dan karena banyaknya resiko menyimpan uang, maka tabungan-tabungan yang semakin besar dimiliki para petani pemilik tanah disimpan dalam bentuk (membeli) tanah. Tanah-tanah ini kemudian dikelola dan diusahakan dalam prinsip-prinsip komersial. Dalam konteks inilah Temple menyimpulkan bahwa diperkenalkannya pupuk-kimia secara luas menyebabkan terjadinya pergeseran dalam hubungan-hubungan produksi di desa, yakni dari hubungan sosial ke hubungan nilai (*value relations*) atau komersial. Hal inilah yang menyebabkan berevolusinya bentuk desa, menjadi *desa komersial* di Jawa yang dimulai sejak tahun 60-an, yang dibedakan dengan *desa komunal* (1830-1870) dan *desa tradisional* (1870-1959) (Temple, 1976).

Revolusi hijau, seperti halnya program pertanian kolonial Belanda (komoditisasi, tanam paksa dan liberalisasi pertanian), selain melahirkan komersialisasi di sektor pertanian secara mendalam, juga mengakibatkan tumbuhnya diferensiasi masyarakat petani, yaitu semakin terkonsolidasi kelompok petani lapisan atas dan menengah yang semakin mendapat untung, sementara petani gurem dan tunakisma semakin tertinggal. (Sajogyo, 1978:4). Dalam penelitian Herman Soewardi (1982:102-117), ditemukan bahwa dalam kasus revolusi hijau direspon secara positif oleh kelompok lapisan atas petani dan mendapat keuntungan darinya, sementara respon itu semakin menurun pada tingkat kelompok lapisan bawah dan terbawah.¹³ Munculnya diferensiasi dan konsolidasi "kelas sosial" di sektor

¹³ Selain sikap-sikap kritis dan pesimis terhadap program revolusi hijau, apa pula peneliti yang optimis dengan revolusi hijau di Indonesia, misalnya P.R. Deuster, "Revolusi Hijau di Desa Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan" dalam Sajogyo (editor), *Bunga Rumpai Perekonomian Desa*, 1982, Yayasan

pertanian ini oleh karena program revolusi hijau dibangun dalam struktur sosial di Indonesia yang tanpa reformasi (Husken dan White, 1989:28).

Revolusi hijau juga melahirkan berbagai marginalisasi petani miskin dan gurem di pedesaan. Penggunaan bibit unggul mengubah teknologi panen padi tidak lagi dengan ani-ani, tetapi harus dengan arit, mengakibatkan keterlibatan tenaga kerja wanita dalam proses panen padi berkurang. Teknologi huller bermotor, menyingkirkan tenaga penumbuk padi wanita, yang menurut Sritua Arief (1979:74-75) menghilangkan kesempatan kerja bagi wanita di pedesaan sampai jutaan orang pada tahun 1974. Faisal Kasryno (1984:159-201) juga melaporkan semakin menurunnya kecenderungan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian akibat penggunaan teknologi baru ini. Kemudian program revolusi hijau mengakibatkan semakin ditinggalkannya sistem *bawon* dan meningkatnya sistem *tebasan* dalam panen padi, yaitu pedagang membawa sendiri para tenaga kerja pemanen padi yang dibayar dengan upah (Sajoyo, 1978:5; Wiradi & Makali 1984: 43-130; Hayami dan Kikuchi, 1987:197-200; juga Penny, 1982:167-175).

Komersialisasi di sektor pertanian dan pedesaan yang memaksa petani harus memasuki pasar (kota), baik untuk menjual produk hasil pertanian mereka, membeli berbagai input untuk produksi pertanian dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, telah menyebabkan terjadi pertukaran yang tidak seimbang atau tidak adil antara sektor desa-pertanian dengan kota-pasar. Hasil survei Sritua Arief (1979:51) menunjukkan dua hal yang berhubungan dengan desa dan kota serta sektor pertanian dengan pasar. *Pertama*, dalam penentuan harga bagi barang-barang sektor yang dijual ke pasar-kota, posisi para pedagang dan agen-agen berada pada posisi yang *monopsonis*. *Kedua*, produsen kecil pertanian (baca: petani subsisten) kemudian mengalami ketidakadilan dalam penentuan harga bagi barang-barang yang mereka butuhkan, yang mereka beli dari pedagang-pedagang kota dan agen-agen yang berada dalam posisi *monopolis*.

Problematis revolusi hijau yang lain adalah (1) dia dibangun dari atas oleh negara secara terpusat, serta (2) mengabaikan partisipasi kognitif kaum tani. Revolusi hijau di manapun hanya dapat diselenggarakan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara sangat terpusat. Menurut John Pontius (1995:62-63) di negeri manapun, revolusi hijau menjadi seperangkat kegiatan perencanaan yang terpusat atau proyek yang sarasannya meningkatkan produksi padi dalam usaha menjamin stabilitas pangan. Sementara itu, petani dianggap sebagai sosok manusia yang tidak tahu ("tidak ilmiah", "tidak terpelajar") dan dianggap memiliki mental yang menghambat pengembangan teknologi baru ini. Karena itu, mereka perlu mendapat penyuluhan untuk mengubah sikap dan mental mereka agar sesuai dengan prasyarat teknologi baru.

Lebih dari itu, menurut Pontius (1995:63) revolusi hijau, bahkan menenpatkan petani sebagai "input" dalam produksi pertanian. *Input* dalam pertanian biasanya adalah bibit, pupuk kimia, pestisida dan pengelolaan air. Tenaga kerja upahan di sektor pertanian juga biasanya dianggap sebagai *input*. Dan petani sebagai *input* di sini adalah bahwa mereka dinilai atas tenaga dan kesediaannya menjalankan berbagai teknologi revolusi hijau. Mereka (petani) diharuskan mengetahui apa yang

Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor. Sikap optimis yang demikian juga ada pada diri Popkin (1989). Meskipun demikian perlu juga dicatat di sini bahwa program revolusi hijau di negeri asal Popkin, Amerika Serikat, juga banyak dikritik dan dikhawatirkan karena telah menyebabkan terancamnya kelestarian alam semesta di muka bumi ini. Lihat Kirkpatrick Sale, *Revolusi Hijau. Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, 1996, Jakarta.

harus digunakan, dikerjakan dan kapan dilakukan. Misalnya, varietas bibit apa yang sebaiknya ditanam, di lahan mana dan kapan seharusnya ditanam, lalu bagaimana memeliharanya agar terjaga dari hama dan penyakit tanaman?

Dalam konteks inilah program penyuluhan (pertanian) menjadi amat penting dalam mendukung program revolusi hijau yang mengasumsikan bahwa manusia petani adalah sosok manusia yang tidak tahu (kalau tidak mau mengatakan sebagai "bodoh"), tidak terpelajar (kurang berpendidikan), punya sikap yang konservatif terhadap perubahan dan inovasi teknologi. Karena itu, sistem penyuluhan dan pendekatan penyuluhan dirancang sedemikian rupa untuk "membantu" petani mengikuti berbagai instruksi teknis sekitar teknologi baru dalam program revolusi hijau.¹⁴

ARGUMEN PENUTUP

Dari uraian panjang di atas hendak disimpulkan, *pertama*, konsep *rational choice* dan *moral choice* adalah suatu *ideal type* (tipe ideal), serta bukan suatu konsep aplikatif untuk rekayasa sosial petani ataupun untuk pilihan kebijakan dalam pembangunan pertanian. Dengan perkataan lain, konsep ini lebih berguna untuk *analisis sosial* daripada sebagai *rekayasa sosial*. Perdebatan tentang kedua tipe ideal konsep ini memang selalu menarik secara akademis, apalagi jika didukung oleh sejumlah fakta-fakta baru dari lapangan. Akan tetapi, secara politis (pada tingkat kebijakan), kedua konsep tersebut perlu selalu dicermati dan dikritisi untuk sebuah landasan pembangunan pertanian, karena sebagai tipe ideal, konsep tersebut perlu terus mendapat legitimasi atau validasi empiriknya yang terus menerus.

Seandainya dibutuhkan untuk "rekayasa sosial", maka konsep-konsep ini harus didapatkan dari riset etnografi yang bersifat fenomenologis dan hermeneutis yang kuat. Riset ini tidak hanya untuk mendapatkan basis kesadaran dan orientasi petani dalam menghadapi berbagai dinamik perubahan, tetapi juga sekaligus untuk menemukan *local knowledge*. Hal yang terakhir ini sangat penting untuk mendasari usaha "rekayasa sosial" yang berbasis pada *local knowledge*, bukan berbasis *general knowledge* atau pengetahuan dari luar. Dalam konteks inilah istilah rekayasa sosial sendiri juga menjadi terkesan sebagai upaya dari luar untuk melakukan perubahan bagi petani. Oleh karena, sangat mungkin dalam riset etnografi ditemukan *local knowledge* yang bersifat konservatif dan tidak menghendaki perubahan seperti yang dituntut pihak luar.

Kedua, istilah "petani rasional" (petani yang melakukan tindakannya atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang logis dan akal budi) tidak selalu identik dengan konsep yang dikonstruksikan oleh Samuel L. Popkin sebagai *rational peasant*, oleh karena "petani rasional" juga terdapat di kalangan petani yang dikonstruksikan James C. Scott sebagai *moral peasant*.

Ketiga, komersialisasi petani dan sektor pertanian tidak (selalu) identik dengan *rational choice* atau "petani rasional" ini. Oleh karena, seperti yang di ilustrasikan

¹⁴ Program penyuluhan yang instruksional dan *top-down* ini sudah banyak mendapat kritik pada tingkat akademik. Misalnya, dengan munculnya ide/gagasan tentang program-program penyuluhan yang partisipatif dan *bottom-up* yang menempatkan petani tidak lagi sebagai obyek, tetapi sebagai subyek utama dari kegiatan penyuluhan, baik pada tingkat perencanaan pesan, pengorganisasian hingga penyampaian pesan penyuluhan. Pada tingkat aksi bahkan model penyuluhan partisipatif ini sudah cukup sering dipraktikkan oleh sejumlah LSM yang bergerak di sektor pertanian dan pedesaan. Model penyuluhan partisipatif ini kemudian menjadi semakin penting ketika bertemu dengan gagasan tentang kebutuhan pelestarian alam semesta, konsep keseimbangan ekologis dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta pengembangan *local knowledge*.

secara panjang lebar sebelumnya, bahwa komersialisasi petani di Indonesia dan tentu juga di beberapa negara sedang berkembang lainnya, bukan terutama karena pertimbangan akal sehat dan pilihan bebas petani, tetapi atas keniscayaan struktural (ketika kolonisasi Belanda maupun semasa pemerintah Orde Baru berkuasa) dan represi rasionalitas negara. Diadopsinya teknologi baru dalam program revolusi hijau oleh petani bukan karena sebuah keputusan petani atas dasar pilihan-pilihan yang bebas dan rasional, tetapi lebih merupakan keterpaksaan struktural maupun karena faktor hegemoni negara yang kuat. Dengan demikian, petani yang berhasil menolak program revolusi hijau (yang di dalam kenyataannya hampir-hampir mustahil) tidak bisa dikatakan sebagai tidak rasional, konservatif, atau fatalis seperti yang dikatakan oleh Popkin. Penolakan terhadap program revolusi hijau justru sebuah pilihan strategi yang (amat) rasional, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal dalam konteks kearifan local, sensitif lingkungan maupun global dan berjangka panjang.

Keempat, mengidentifikasi petani komersial yang ada di Indonesia sekarang ini dengan *farmer* (pengusaha petani) seperti yang digambarkan oleh A.T. Mosher (1966) adalah sikap yang tidak hati-hati, gegabah, atau bahkan keliru dan berbahaya. Oleh karena komersialisasi petani di Indonesia terjadi atas paksaan dari luar dan bukan tumbuh karena proses sosiologis dan ekonomis secara internal dalam masyarakat petani. Apalagi dalam kenyataannya, petani komersial di Indonesia selain memiliki tanah yang sempit-sempit, bahkan rata-rata di bawah setengah hektar, juga masih amat tergantung pada subsidi negara dalam saprodi. Atas dasar itu, petani komersial di Indonesia tetap dalam kategori *peasant* seperti yang dikonstruksikan oleh Eric Wolf. Dengan demikian, saat ini sangat mendesak untuk meninjau kembali konsep pembangunan pertanian Indonesia yang sudah terlanjur sekian lama memandang petani di negeri ini sebagai sosok *farmer* yang digambarkan oleh Mosher tentang petani-petani di negara-negara sedang berkembang atau negara miskin.

Bagaimana mungkin sebuah pembangunan akan berhasil apabila membangun masyarakat *peasant* di Indonesia dengan model pembangunan untuk masyarakat *farmer*? Dua sosok petani ini, yakni *peasant* dan *farmer*, memiliki sistem nilai, sistem gagasan, sudut pandang, strategi hidup, organisasi sosial, dan struktur sosial yang berbeda-beda sehingga menuntut model perubahan maupun transformasi yang berbeda pola.

Kekeliruan pembangunan pertanian yang kini terus saja berlangsung adalah berawal dari cara memandang siapa sebenarnya manusia petani itu? Apakah mereka *peasant* atau *farmer*? Studi antropologi tentang petani dan pertanian akan memberikan kontribusi yang konstruktif dan produktif bagi pembangunan apabila berhasil menjawab pertanyaan ini dengan riset yang komprehensif dan mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth. Bapak Prof. Dr. Safri Sairin yang telah memberi inspirasi teoritis dan sejumlah bahan bacaan pada penulis sehingga menghasilkan sebuah karya tulisan yang dapat dipublikasikan. Penulis juga berterima kasih pada Yth. Bapak Ir. Supriyanto, M.Sc. yang memberikan sejumlah kritik dan perbaikan atas tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaluddin, Moh, 1987, *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial, Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah*, Univeristas Indonesia Press, Jakarta;
- Antlov, Hans, 1995, *Exemplary Centre, Administrative Periphery (Rural Leadership and The New Order in Java)*, Curzon Press;
- Arief, Sritua, 1979, *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta;
- Collier, William L., 1977, "Agricultural Evolution in Java, The Decline of Shared Poverty and Involution", *stenselan*. Bogor;
- Collier, William L, dkk., 1996, *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Dalton, George, (ed.), 1981, *Tribal and Peasant Economies, Reading in Economic Anthropology*, University of Texas, 1981, USA, khususnya Bab tentang Afrika, hal. 51-168
- Deuster, P.R., "Revolusi Hijau di Desa Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan" dalam Sajogyo (editor), *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, 1982, Yayasan Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.
- Geertz, Clifford, 1983, *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekonomi di Indonesia*, Bharatara, Jakarta;
- Halperin, Rhoda and James Dow (ed.), *Peasant Livelihood, Studies in Economic Anthropology and Cultural*, ST. Martin's Press, 1977, New York;
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi, 1987, *Dilema Ekonomi Desa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Hefner, Robert W., 1999, *Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, LKiS, Yogyakarta;
- Husken, Frans dan Benjamin White, 1989, "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa", *Prisma*, Jakarta;
- Kano, Hiroyoshi, 1986, "Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan Jawa: Suatu Penafsiran Kembali", dalam Akira Nagazumi, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Kasryno, Faisal, "Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian dan Tingkat Upah" dalam Faisal Kasryno (editor), 1984, *Prospek Pembangunan Ekonomi di Pedesaan Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Kearny, Michael, 1996, *Reconceptualizing the Peasantry, Anthropology in Global Perspective*, Westview Press Inc. A Division of Harper Collin Publishers, USA;
- Mosher, A.T., 1966, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian, Syarat-syarat Mutlak Pembangunan dan Modernisasi*, Yayasan Dana Buku Indonesia (Frankin Book Program, Inc.), Jakarta;
- Mubyarto, 1978, "Involusi Pertanian dan Pemberantasan Kemiskinan, Kritik Terhadap Clifford Geertz", *Prisma*, No.2, Jakarta;
- Pakpahan, Agus, dkk., 1993, "Perkembangan Kesejahteraan Petani Pangan", *Prisma*, 5, hal. 49-55;

AGROEKONOMI

- Penny, D.H., 1982, "Komersialisasi Pertanian Subsisten: Suatu Kemajuan atau Kemunduran," dalam Sajogyo (ed.), *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Yayasan Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor;
- Pontius, John, 1985, "Revolusi Hijau di Indonesia Selama ini, dalam laporan khusus *Prisma*, No. 2, Jakarta;
- Popkin, Samuel L., 1986, *Petani Rasional*, terjemahan Sjahrir Mawi, Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri, 1986, Jakarta;
- Popkin, Samuel L., 1989, "Memahami Petani secara Rasional" dalam dialog *Prisma*, No. 9, Jakarta;
- Reijntjes, Coen, Bertus Haverkort dan Ann Water-Bayer, 1999, *Pertanian Masa Depan, Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah*, Penerbit Kanisius, Mitra Tani dan ILEIA.
- Sale, Kirkpatrick, 1996, *Revolusi Hijau, Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta;
- Sajogyo, 1978, "Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Pedesaan Jawa," *Prisma*, No. 3, Jakarta;
- Scott, James, C, 1983, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta;
- Scott, James C., 2000, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Yayasan Obor Indonesia, 2000, Jakarta;
- Shanin, Theodore, ed., 1987, *Peasants and Peasant Societies*, new editon, Penguin Books, England;
- Soewardi, Heman, 1982, "Respon Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi di Bidang Produksi Pertanian di Jawa Barat," dalam Sajogyo (ed.), *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Yayasan Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor;
- Temple, Gordon P., "Mundurinya Involusi Pertanian: Migrasi Kerja dan Pembagian Pendapatan di Pedesaan Jawa," *Prisma*, No.3/1976;
- Tsing, Anna Lowenhaupt, 1998, *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- White, Benjamin, 1974, "Agricultural Involution, a Critical Note", 1974, Bogor, *Agro-economic Survey*, Workshop Rural Dynamics Study;
- Winarto, Yunita T., 1997, "Pengendalian Hama Terpadu: Pembentukan dan Pengalihan Pengetahuan di antara para Petani Padi di Subang, Jawa Barat," dalam buku E.K.M. Masinambow (ed.), *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*, Yayasan Obor dan Asosiasi Antropologi Indonesia, Jakarta;
- Wiradi, Gunawan dan Makali, "Penguasaan Tanah dan Kelembagaan" dalam Faisal Kasryno (editor), 1984, *Prospek Pembangunan Ekonomi di Pedesaan Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Wolf, R. Eric, 1969, *Peasant War of The Twentieth Century*, Harper and Row, 1969, New York;
- Wolf, R. Eric, 1983, *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*, Penerbit Rajawali dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta.